

Dialog

Vol. 41, No. 1, Juni 2018

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PENANGGUNGJAWAB

Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D.

MITRA BESTARI

Prof. Robert Hefner (Boston University)
Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Prof. Dr. Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Saiful Umam, Ph.D (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Dr. Muhammad Adlin Sila, M.A. (Balai Litbang Agama Jakarta)
Prof. Dr. Imam Tholkhah (Universitas Muhammadiyah Malang)
Dr. Hayadin, M.Pd. (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan)
Amelia Fauzia, Ph.D. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Visiting Senior Research Fellow, Asia Research Institute, National University of Singapore)
Dr. Arief Subhan (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Lukmanul Hakim (LaKIP Jakarta)

REDAKTUR (KETUA)

Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi

ANGGOTA

Drs. H. Hefson Aras, M.Pd.
Sri Hendriani, S.S.i.
Rahmatillah Amin, S.Kom.
Abas, M.Si.

PENYUNTING

Astuti Nilawati, S.Pd.
Wawan Hermawan, S.Kom.
Dewi Indah Ayu D., S.Sos.

SEKRETARIAT:

Ihyakulumudin, S.S.i., Abdul Syukur, S.Kom., Dwi Partini, S.Pd.I, Yuni Yanti, S.Kom.

DESAIN GRAFIS: Rr. Sinar Dewi,

FOTOGRAFER: Fitri Rahayu Apriliani

REDAKSI DAN TATA USAHA

Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat – Telp./Fax. (021) 3920688 – 3920662
e-mail : sisinfobalitbangdiklat@kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jurnal Dialog sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

Jurnal dialog kali ini menampilkan sembilan tulisan dari penelitian yang beragam. Iyoh Mastiyah menulis tentang *Assessment studies Religious Educational Education Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) in Hong Kong* yang menjelaskan tentang posisi dan aktifitas Muslim Indonesia di Hong Kong yang bergerak dibidang pendidikan. Mastiyah memberikan gambaran yang penting tentang perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliah di Hong Kong yang dikelola oleh Muslim yang tinggal disana. Kajian ini memberikan gambaran yang cukup gamblang dalam kaitannya dengan kiprah kaum Muslimin di Hong Kong yang berjuang untuk memberikan dasar-dasar pendidikan agama di negeri yang mayoritasnya bukanlah Muslim. Hal ini tentu saja dapat menginspirasi kaum Muslimin yang mengelola pendidikan Islam di Negeri yang mayoritas penduduknya umat Islam untuk terus berjuang dalam mengembangkan pendidikan Islam yang lebih baik.

Tulisan selanjutnya dari Achmad Dudin, menganalisis tentang studi kasus implementasi kurikulum 2013 di beberapa Madrasah Aliyah di Kalimantan Barat. Dudin menggambarkan tentang efektivitas pelaksanaan yang cukup baik namun masih perlu ditingkatkan dengan sarana dan prasarana serta pembinaan yang lebih baik. Kajian ini memberikan gambaran bahwa implementasi suatu kebijakan haruslah didukung oleh persiapan yang matang serta sarana dan prasarana yang mencukupi untuk memberikan hasil yang optimal.

Selanjutnya Asep Saifullah dalam jurnal ini menurunkan tulisan tentang minat baca dan tema bahan bacaan keagamaan guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA di Kota Tangerang Banten. Asep menjelaskan tentang pemanfaatan yang belum optimal dari para guru PAI SMA, khususnya di Kota Tangerang sehingga wawasan para gurunya perlu ditingkatkan. Masih berkaitan dengan pendidikan, Farida Hanun menulis tentang Madrasah yang menerapkan sistem bilingual untuk meningkatkan penguasaan bahasa Asing bagi siswa program kelas Bilingual di MIN I Kota Tangerang Selatan. Hanun memberikan

gambaran tentang tantangan dan hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan program tersebut dan menjelaskan pentingnya prasarana madrasah penyelenggara program kelas bilingual tersebut ditingkatkan agar dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih baik.

Tulisan selanjutnya dari Agustina masih menyoroti tentang peningkatan kompetensi pedagogik guru madrasah melalui diklat berkualitas. Dalam tulisannya Agustina memberikan gambaran urgensi kualitas guru dalam menghasilkan anak didik yang berkualitas.

Vilya Lakstian Catra Mulia menulis tentang analisis teks sebagai salah satu pendekatan untuk menemukan dinamika bahasa ibu yang kini dalam kondisi yang memprihatinkan. Menurut Vilya, hal tersebut amat penting karena penguasaan terhadap bahasa ibu akan berdampak pada penyajiannya yang secara informatif dan berorientasi untuk menambah wawasan. Lebih lanjut Vilya menyarankan perlunya penyampaian yang lebih berimbang dengan transaksi tindakan, seperti perintah dan himbauan kepada pembaca agar kondisi bahasa ibu lebih mendapat perhatian melalui aksi.

Pada tulisan selanjutnya, Hendri menjelaskan tentang peningkatan mutu tenaga teknis keagamaan atau tenaga pendidik yang menjadi poin penting dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Agama. Oleh karena itulah, menurut hasil kajian Hendri, efektivitas dalam pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan yang dapat menghasilkan pengaruh yang tepat, akurat, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam tulisannya, Hendri memberikan kasus pada Pendidikan dan Pelatihan Guru Bahasa Inggris MTs Tingkat Dasar Tahun 2017 yang dilaksanakan di kampus Balai Diklat Keagamaan Padang dari tanggal 14 sampai dengan 26 September 2017.

Tulisan selanjutnya dari Rosidin menyajikan tema yang berbeda dengan tema-tema di atas yang cenderung pada pendidikan Islam. Dalam kajiannya, Rosidin memberikan gambaran tentang Masjid yang merupakan sentra pembinaan masyarakat pemeluk Islam. Dengan

demikian, maka pengelolaan masjid haruslah selalu ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat Islam. Tulisan Rosidin menggambarkan indeks pengelolaan masjid dan menganalisis aspek prioritas pengelolaan masjid di Kabupaten Trenggalek dengan segala permasalahannya.

Tulisan terakhir dari Novita Siswayanti tentang kearifan lokal memberikan gambaran tentang ritual Penjaroan Rajab di Masjid Saka Tunggal Desa Cikakak. Tulisan tentang ritual ini memberikan gambaran tentang urgensi pelestarian kearifan lokal dengan contoh kearifan lokal masyarakat Cikakak sebagai elemen perekat lintas warga dan lintas agama yang memberikan warna kebersamaan.

Kesembilan tulisan pada edisi ini memberikan gambaran tentang tiga hal yang saling berkelindan yaitu urgensi peningkatan pendidikan pada institusi pendidikan Islam pertama. Kedua urgensi masjid yang pada hakekatnya juga menjadi sarana pendidikan Islam agar dapat dikelola dengan baik sehingga dapat

meningkatkan manfaat yang lebih besar bagi umat baik secara materil maupun non materil. Ketiga adalah tentang kearifan lokal yang pada hakekatnya juga merupakan elemen penting dalam peningkatan pendidikan keagamaan dalam masyarakat. Kearifan lokal sebagai warisan budaya masyarakat yang berisi nilai-nilai pendidikan baik budaya maupun agama pada hakekatnya merupakan bagian penting dalam peningkatan pendidikan masyarakat.

Relevan dengan hal tersebut maka keseluruhan tulisan pada edisi ini sesungguhnya saling terkait dalam kaitannya dengan pendidikan agama dan kebangsaan bagi generasi muda dan masyarakat Islam di Indonesia. Kami berharap pembaca dapat mengambil manfaat yang besar dari tulisan-tulisan ini. Selamat membaca.

Dewan Redaksi

IYOH MASTIYAH

Studi Assesmen Rintisan Pendidikan Keagamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Hong Kong: 1-18

ACHMAD DUDIN

Studi Kasus Implementasi Kurikulum 2013 pada Beberapa Madrasah Aliyah di Propinsi Kalimantan Barat: 19-34

ASEP SAEFULLAH

Minat Baca dan Literatur Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA di Kota Tangerang Banten: 35-52

FARIDA HANUN

Madrasah Berprestasi dengan Kelas Bilingual: 53-64

AGUSTINA

Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah Melalui Diklat Berkualitas: 65-74

VILYA LAKSTIAN CATRA MULIA

Refleksi Kondisi Bahasa Ibu di Indonesia Melalui Analisis Teks Media: 75-86

HENDRI

Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Guru Bahasa Inggris MTs: 87-100

ROSIDIN

Indeks Pengelolaan Masjid Berbasis Masyarakat di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur: 101-110

NOVITA SISWAYANTI

Penjarohan Rajab di Masjid Sakatunggal Cikakak: Sebuah Kajian Kearifan Lokal: 111-120

BOOK REVIEW

NASRULLAH NURDIN

Khazanah Budaya Keagamaan Kasunanan Surakarta: 121-124

CASE STUDY ON CURRICULUM IMPLEMENTATION 2013 IN SOME MADRASAH ALIYAH IN WEST KALIMANTAN PROVINCE

ACHMAD DUDIN^{*)}

ABSTRACT

This paper is the result of a case study in 2016. The study was overshadowed by the implementation of the 2013 curriculum in Islamic Senior High School (Madrasah Aliyah). It was conducted in several Madrasah Aliyahs in the Province of West Kalimantan. The data and information were collected using qualitative-evaluative study through qualitative and descriptive approach. The study is mainly based on some accounts of various parties involved in the implementation of the 2013 curriculum (K.13), such as the principles, teachers, supervisors and madrasah committees. The findings of this research indicate that the implementation of K.13 in the provincial office of Ministry of Religious Affairs as the pilot project in 19 MAs is a priority, but the second policy after the issuance of the General Director of Islamic Education Regulation no. 482 Th. 2015 on the peer Madrasah for the implementation of K.13 in the academic year 2014/2015. However, this initiative needs to consider the level of readiness among the MAs in the province due to the unavoidable local obstacles.

KEY WORDS: *Evaluation, implementation, curriculum 2013, Madrasah Aliyah*

STUDI KASUS IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA BEBERAPA MADRASAH ALIYAH DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil studi kasus tahun 2016. Latar belakang dari studi kasus ini adalah adanya persoalan implementasi kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah, yang menuntut perbaikan. Studi ini mengambil kasus di beberapa MA di Propinsi Kalimantan Barat. Data dan informasi diperoleh melalui studi kualitatif evaluatif, dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Hasil studi ini, merupakan penilaian atau pendapat dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kurikulum 2013 pada beberapa MA di Propinsi Kalimantan Barat, seperti kepala MA, guru, pengawas, dan komite madrasah. Temuan penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan implementasi K.13 di Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, untuk pilot project terhadap 19 MA, adalah prioritas, namun kebijakan kedua setelah diterbitkannya Peraturan Dirjen Pendis Kemenag No. 482 Th. 2015 tentang Penetapan Madrasah Pendampingan K.13, maka Tahun Pelajaran 2014/2015 memberlakukan K.13 namun keberadaannya perlu ditopang kesiapan yang matang mengingat dalam implementasi K.13 se Kalbar banyak ditemui kendala.

KEY WORDS: *Evaluasi, implementasi, kurikulum 2013, Madrasah Aliyah*

^{*)} Peneliti pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Jl. M.H. Thamrin, nomor 6. Lantai 19. Jakarta Pusat. Email: achmad.dudin@gmail.com

* Naskah diterima Maret 2018, direvisi April 2018 dan disetujui untuk diterbitkan Mei 2018

A. PENDAHULUAN

Pendidikan di madrasah tidak lepas dari istilah kurikulum sebagai salah satu komponen pembelajaran. Kurikulum proses pembelajaran akan berjalan secara terstruktur dan tersistem demi mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pengembangan kurikulum menjadi sangat penting sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan perubahan pada masyarakat. Untuk mencapai tujuan mulia dari pembelajaran tersebut, maka para pengembang kurikulum terus berbenah dan melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang diberlakukan.

Kurikulum 2013 merupakan hasil pengembangan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum terbaru yang implementasinya baru dimulai di lapangan mulai tahun 2013.¹ Perubahan kurikulum 2006 ke 2013 untuk sekolah umum, kejuruan, dan madrasah itu hanya satu dari sekian banyak kebijakan pemerintah yang perlu disikapi secara arif. Diakui kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang sejak kelahirannya sudah banyak menyita perhatian baik dari kalangan pengamat, pakar, pendidik dan masyarakat umum. Perhatian tersebut bukan hanya pada substansinya melainkan juga pada implementasinya di lapangan.

Kurikulum 2013 sesuai dengan namanya, lahir pada tahun 2013 dan pada saat itu juga ditargetkan harus sudah pada tahapan implementasi. Seperangkat kelengkapan dan prosedur disiapkan untuk mengejar target implementasi tersebut sehingga sedikit banyak mengabaikan kesiapan di lapangan. Akibat yang ditimbulkan, banyak sekolah dan madrasah merasa belum siap untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 tersebut tetapi harus melaksanakan. Kondisi ini yang kemudian Kemendikbud dan Kemenag mengambil jalan alternatif yaitu dengan membuat piloting implementasi kurikulum 2013 dengan memilih sekolah dan madrasah yang dianggap siap.

Implementasi awal kurikulum diberlakukan untuk sejumlah kelas dan sejumlah sekolah dan

madrasah. Di madrasah, tahap awal implementasi kurikulum 2013 dikhususkan pada mata pelajaran pendidikan agama. Untuk SD/MI diberlakukan di kelas I dan IV sedangkan SMP/MTs di kelas VII dan SMA/SMK/MA di kelas X. Implementasi penuh dilaksanakan pada tahun berikutnya sesuai dengan progres siswa dalam belajar dan oleh karena itu implementasi penuh baru terjadi tahun ketiga implementasi. Implementasi kurikulum 2013 di madrasah memiliki problem yang hampir sama dengan sekolah pada umumnya. Secara konsep dan formula implementasi kurikulum 2013 di madrasah didasari atas kebijakan tersendiri yaitu kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Maka, secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kurikulum 2013 di Kementerian Agama mulai dari penyiapan konsep, perangkat lunak, perangkat keras, pada hakekatnya berada di Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Dalam konteks pengembangan kurikulum, secara teoretik didasarkan pada konsep *curriculum development*, dimana keseluruhan dimensi kurikulum yaitu ide, desain, implementasi dan evaluasi kurikulum direncanakan dalam satu kesatuan. Konsep *curriculum development* menghendaki suatu tim yang sejak awal merancang pengembangan ide kurikulum (*curriculum idea*), dokumen kurikulum (*curriculum construction*), implementasi kurikulum (*curriculum implementation*), dan evaluasi kurikulum (*curriculum evaluation*) dalam suatu desain utuh (*grand design*). Tetapi apa yang dilakukan dalam semua tahapan di atas tidak bisa lepas dari konteks dan definisi kurikulum yang dirumuskan.² Artinya, bahwa evaluasi (implementasi) kurikulum pada hakekatnya adalah suatu tahapan yang harus dilakukan agar bila terdapat kekeliruan bisa segera diperbaiki. Dengan demikian, studi kasus ini dilakukan dalam konteks seperti itu, agar bisa menemukan gap antara yang seharusnya dan relitas yang terjadi di lapangan sehingga ke depan bisa memberi masukan, pada aspek apa saja yang masih memerlukan perbaikan.

¹ *Implementasi Kurikulum 2013*. <https://annisarosmma.wordpress.com/2014/07/10/implementasi-kurikulum-2013> (diakses 8 Juli 2018).

² Lihat, Naskah Akademik Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2013.

Rumusan Masalah

Secara umum rumusan masalah studi kasus ini adalah bagaimana implementasi Kurikulum 2013 pada beberapa MA yang menjadi sasaran di Propinsi Kalimantan Barat. Secara khusus rumusan masalah studi kasus ini adalah: (1) bagaimana kebijakan kurikulum 2013 madrasah di Kanwil Kemenag Propinsi Kalimantan Barat, terkait mekanisme penetapan kurikulum 2013 di madrasah, pembentukan tim kerja, desain induk kurikulum 2013, penyusunan dokumen dan penyiapan ketenagaan; dan (2) bagaimana fenomena implementasi Kurikulum 2013 pada madrasah di Propinsi Kalimantan Barat, menurut penilaian berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kurikulum 2013 pada beberapa MA di Propinsi Kalimantan Barat, seperti kepala MA, guru, pengawas, dan komite madrasah.

Tujuan Studi

Secara umum tujuan studi ini adalah ingin mengkaji dan mengevaluasi implementasi Kurikulum 2013 pada beberapa MA yang menjadi sasaran di Propinsi Kalimantan Barat. Secara khusus studi kasus ini bertujuan untuk: (1) melakukan kajian pada aspek kebijakan kurikulum 2013 madrasah di Kanwil Kemenag Propinsi Kalimantan Barat, terkait mekanisme penetapan kurikulum 2013 di madrasah, pembentukan tim kerja, desain induk kurikulum 2013, penyusunan dokumen dan penyiapan ketenagaan; (2) mengevaluasi dengan mendeskripsikan mengenai fenomena implementasi Kurikulum 2013 pada MA di Propinsi Kalimantan Barat, menurut penilaian berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kurikulum 2013 pada beberapa MA di Propinsi Kalimantan Barat, seperti kepala MA, guru, pengawas, dan komite madrasah

KAJIAN LITERATUR

Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Wahab, sebagaimana mengutip pendapat Mazmanian

dan Sebastiar, menjelaskan Implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.³

Pendapat Cleaves sebagaimana dikutip Wahab, menyebutkan bahwa Implementasi itu mencakup "Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik". Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Adapun menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁴

Riant Nugroho menggambarkan pelaksanaan atau implementasi di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi dalam mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.⁵ Adapun Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman, mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan".⁶

Berdasarkan analisis teori tersebut di atas dapat dipahami bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum

³ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008).

⁴ *ibid.*

⁵ Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004).

⁶ Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

terbaru, hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya, Kurikulum KTSP atau Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). KTSP menggunakan pendekatan terpusat pada bidang studi (*subject-centered curriculum*) ini sejak 2006 telah diterapkan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan Permendikbud Nomor 65 yang menyatakan perlunya dilakukan perubahan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, serta sistem pembelajaran dan sistem penilaian sebagai implikasi dari perubahan pada standar proses pendidikan tersebut.⁷

Sesungguhnya tema perbaikan Kurikulum 2013 adalah ingin menciptakan manusia Indonesia yang mampu berpikir kreatif, produktif, inovatif, proaktif, dan afektif, melalui pengembangan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu tentang apa) secara integratif. Pengintegrasian ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki peringkat Indonesia berdasarkan studi TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*) dan *Program for International Student Assessment* (PISA), dimana pada 2011 peserta didik hanya mampu sampai level 3 dari 6 (enam) level kemampuan kognitif yang berkaitan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi (berpikir kritis, berpikir kreatif, analitis, sistematis dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah). Begitu juga kemampuan siswa Indonesia dalam memahami informasi yang kompleks, pemecahan masalah, pemakaian alat, prosedur, pemecahan masalah dan melakukan investigasi yang masih berada rendah dan perlu ditingkatkan. Untuk itu, salah satu pendekatan pembelajaran yang dipandang tepat untuk mengintegrasikan ketiga aspek di atas, ialah dengan dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan *pendekatan saintifik*.

Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang dilakukan melalui proses mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), mencoba (*experimenting*), menalar (*associating*), dan

⁷ Mendikbud RI. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (2013).

mengkomunikasikan (*communication*).⁸ Menurut Matur, pendekatan pembelajaran saintifik merupakan pola pembelajaran yang mendorong siswa agar belajar secara aktif dengan mencurahkan segenap pikirannya secara kritis, analitis, dalam memecahkan masalah pembelajarannya dengan cara mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan menciptakan.⁹ Menurut Hosnan bahwa pendekatan saintifik dipandang relevan dengan tiga teori belajar, yaitu teori Bruner, teori Piaget, dan teori Vygotsky. Bruner sendiri teorinya dikenal dengan teori belajar penemuan.¹⁰ Bahkan sebagian kalangan menilai bahwa pemilihan pendekatan saintifik pada Kurikulum 2013 dianggap tepat, karena pendekatan ini cocok bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi.¹¹

Selain itu sistem penilaian pada Kurikulum 2013 yang diatur dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 menjelaskan bahwa guru dan satuan pendidikan wajib mengevaluasi hasil belajar siswa secara komprehensif, menyeluruh, kompleks, dan valid.¹² Diantaranya menggunakan penilaian autentik sebagai alat ukurnya. Penilaian autentik merupakan kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrument penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di standar kompetensi (SK) atau kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD).¹³ Devinisi lain disebutkan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang melibatkan siswa di dalam tugas-tugas autentik yang bermanfaat, penting dan bermakna yang

⁸ M. Fadlillah, *Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 175.

⁹ Matur. "Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pelaksanaan Pembelajaran di SMP." *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan Implementasi* 4 (2017): 50-64.

¹⁰ M. Hosnan, *Pendekatan Saintifik dan Kontekstua Dalam Pembelajaran Abad21: Kunci Sukses Implementasi Kurikulum 2013* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 35.

¹¹ Daryanto, *Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 60.

¹² Mendikbud RI. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian (2013).

¹³ Kunandar, *Penilaian Autentik: Penilaian Hasil belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 35.

selanjutnya dapat dikatakan sebagai penilaian performa.¹⁴

Berkaitan dengan perubahan pendekatan pembelajaran dan penilaian di atas, maka implementasi Kurikulum 2013 tidak semudah dikatakan. Penyempurnaan kurikulum yang dibarengi dengan perubahan struktur mata pelajaran, perubahan sistem pembelajaran, dan perubahan sistem penilaian selalu berhubungan dengan berbagai aspek dalam sistem pendidikan. Guru, kepala sekolah, waktu, sumber belajar, dan sarana prasarana sekolah merupakan unsur yang berkaitan langsung dengan penerapan Kurikulum 2013. Jika perubahan kurikulum tidak dibarengi dengan perbaikan sarana prasarana, akses sumber belajar yang mudah dan berkualitas, dan peningkatan kompetensi serta perubahan *mindset* guru, maka upaya peningkatan mutu pendidikan hanya sia-sia belaka. Ini sejalan dengan pemikiran Lee yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum, termasuk pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan persiapan pendidik dan tenaga kependidikan¹⁵. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas maka implementasi kurikulum 2013 selalu berhubungan dengan berbagai aspek dalam sistem pendidikan. Unsur yang berkaitan langsung dengan implementasi Kurikulum 2013 di madrasah Aliyah (MA), adalah guru, kepala sekolah, waktu, sumber belajar, dan sarana prasarana MA.

Madrasah aliyah (MA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas (SMA), yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pendidikan madrasah aliyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kurikulum MA sama dengan kurikulum SMA, hanya saja pada MA terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam. Selain mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam sebagaimana SMA, juga

ditambah dengan pelajaran-pelajaran seperti; Alquran dan Hadits, Aqidah dan Akhlaq, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

Untuk aspek dalam kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah mencakup dokumen kurikulum, buku panduan guru dan buku teks pelajaran untuk peserta didik, serta pedoman lain sebelum tahun pendidikan baru dimulai. Termasuk persiapan lapangan berkenaan dengan pelatihan para pengguna kurikulum terutama guru, kepala sekolah dan pengawas. Evaluasi terhadap implementasi kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah ditujukan untuk mengkaji rancangan yang dibuat oleh satuan pendidikan, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan kegiatan pembelajaran. Pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses implementasi kurikulum di Madrasah Aliyah mampu mencapai kompetensi peserta didik yang diharapkan. Termasuk dalam evaluasi ini adalah kajian tentang seberapa jauh pedoman implementasi kurikulum 2013 di MA memfasilitasi pengelolaan kurikulum secara optimal di lapangan.

Implementasi Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah

Implementasi kurikulum 2013 madrasah Aliyah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan kurikulum (*curriculum development*) yang merupakan tindak lanjut dari konstruksi dokumen kurikulum (*curriculum construction*). Dua kegiatan utama dalam implementasi kurikulum adalah menentukan strategi implementasi dan pelaksanaan implementasi kurikulum. Strategi implementasi adalah kegiatan menyiapkan lapangan untuk melaksanakan kurikulum. Sedangkan pelaksanaan implementasi adalah kegiatan para pengguna kurikulum (*curriculum users*) yaitu guru, kepala sekolah dan pengawas dalam menerapkan apa yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum meliputi ketersediaan dokumen untuk digunakan oleh madrasah dan guru yang akan mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada tahun 2014-2015.

Untuk menerapkan kurikulum 2013 di madrasah pada masa awal diperlukan penyiapan lapangan yang dinamakan strategi implementasi kurikulum 2013. Kegiatan dalam strategi

¹⁴ Y. Abidin, *Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013* (Bandung: Rafika Aditama, 2013), 81.

¹⁵ A. Lie, *Cooperative Learning (Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas)*. (Jakarta: Grasindo, 2012).

implementasi kurikulum 2013 terdiri atas pelatihan awal guru dan pendampingan selama masa implementasi awal. Model ini digunakan karena pelatihan sesaat (*one-shot training*) sebagai strategi implementasi tidak pernah memberikan hasil yang mampu menerapkan rancangan kurikulum secara benar dan utuh. Pendampingan diperlukan untuk membantu para pengguna kurikulum mengatasi masalah yang tidak diperkirakan muncul (*unexpected problems*) pada saat pelatihan dan pada saat kurikulum mulai diimplementasikan.

Implementasi Kurikulum 2013 di sekolah dan madrasah, dimulai: (1) pada bulan Juli 2013 untuk Kelas I, IV terbatas pada sejumlah SD/MI (30%), dan seluruh kelas VII (SMP/MTs), dan kelas X (SMA/MA, SMK/MAK). Ini adalah tahun pertama implementasi dan dilakukan di seluruh wilayah NKRI; (2) mulai Juli 2014: Kelas I, II, IV, V, pada sejumlah SD/MI (60%), dan seluruh kelas VII, VIII, X, dan XI: tahun 2014 adalah tahun kedua implementasi kurikulum 2013 di seluruh wilayah NKRI. Pada tahun kedua ini, hanya kelas terakhir SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK yang belum melaksanakan kurikulum; (3) untuk bulan Juli 2015: seluruh kelas dan seluruh sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK telah melaksanakan sepenuhnya Kurikulum 2013. Pada akhir tahun ketiga implementasi diharapkan permasalahan yang dihadapi para pelaksana sudah tidak lagi merupakan masalah mendasar dan kurikulum sudah dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Permasalahan lapangan yang muncul adalah yang dapat diselesaikan oleh kolaborasi guru, kepala sekolah dan pengawas di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota.¹⁶ Pada bulan Juli 2013 – 2016 pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Kurikulum 2013 di sekolah dan madrasah. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan.

Implementasi kurikulum di sekolah dan madrasah untuk waktu tertentu perlu dievaluasi dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai komponen dari dokumen kurikulum dan

¹⁶ *Implementasi dan Evaluasi Kurikulum 2013*. <http://kurikulum2013indonesia.blogspot.com/2013/12/implementasi-kurikulum-2013.html> (diakses 8 Juli 2018).

implementasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dilaksanakan sepanjang proses pengembangan dokumen dan implementasi kurikulum. Evaluasi yang dilakukan berfungsi sebagai evaluasi formatif yang ditujukan untuk memperbaiki berbagai komponen dari dokumen kurikulum dan implementasi kurikulum. Evaluasi dalam fungsi formatif diberlakukan sampai implementasi mencapai tahap implementasi penuh. Evaluasi formatif dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan oleh tim pengembang kurikulum sedangkan secara eksternal dilakukan oleh ahli di luar tim pengembang kurikulum. Para ahli tersebut diundang secara khusus dan berdasarkan keahlian yang diperlukan kurikulum untuk melakukan evaluasi terhadap kesahihan ide kurikulum, validitas Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Sebelum memasuki tahap implementasi penuh dilakukan evaluasi dengan fungsi sumatif untuk menentukan apakah kurikulum sudah dapat diimplementasikan secara penuh ataukah masih memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan.

Evaluasi terkait studi kasus implementasi Kurikulum 2013 di madrasah diarahkan pada adanya dokumen kurikulum, buku panduan guru dan buku teks pelajaran untuk peserta didik, serta pedoman lain sebelum tahun pendidikan baru dimulai. Termasuk persiapan lapangan berkenaan dengan pelatihan para pengguna kurikulum terutama guru, kepala sekolah dan pengawas. Evaluasi terhadap implementasi kurikulum ditujukan untuk mengkaji rancangan yang dibuat oleh satuan pendidikan, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan kegiatan pembelajaran. Pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan kurikulum mampu mencapai kompetensi peserta didik yang diharapkan. Termasuk dalam evaluasi ini adalah kajian tentang seberapa jauh pedoman implementasi kurikulum memfasilitasi pengelolaan kurikulum secara optimal di lapangan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam studi ini adalah kualitatif evaluatif, dengan studi kasus pada beberapa MA di Propinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui pendalaman tentang

implementasi kurikulum 2013 MA kepada pejabat Kemenag (Kanwil Kemenag Propinsi Kalimantan Barat), yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan. Pendekatan deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan mengenai fenomena nyata implementasi Kurikulum 2013 pada madrasah di Propinsi Kalimantan Barat. Pendekatan deskriptif cenderung bersifat kualitatif dalam konteks evaluasi kebijakan formal (*formal policy evaluation*)¹⁷ atau (*formal policy impacts*)¹⁸ pada kondisi obyek yang alamiah dan analisis data bersifat induktif. Evaluasi ini memanfaatkan berbagai pendekatan lintas disiplin ilmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode penyelidikan, dalam konteks argumentasi dan debat publik¹⁹. Untuk itu diperlukan pendekatan dan disiplin ilmu yang bervariasi yang sesuai dengan situasi, hakekat masalah, bersifat kontekstual, multi-metode, dan berorientasi pada masalah. Di samping itu dilakukan telaah dokumen pada dokumen terkait penelitian ini untuk menyelidiki benda-benda tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah data terkumpul.²⁰ Analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi. Teknik analisis yang digunakan mencakup tiga proses analisis seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman²¹ yaitu dilakukan reduksi data, penyajian data, penggambaran dan pembuktian data penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Kurikulum 2013 di MA

Secara umum dasar penetapan madrasah sebagai pelaksana K.13 adalah adanya: (1)

¹⁷ W.N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Erwan Agus Purwanto, Edisi Kedua, 2000).

¹⁸ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (Prentice Hall: Englewood Cliffs, 1981).

¹⁹ P DeLeon. "The missing link revisited: contemporary implementation research." *Policy Studies Review* 16 (2006): 311-38.

²⁰ Sudarsono, *Beberapa Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), 236.

²¹ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds), *Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 1994), 429.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 912 tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab; (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab; (3) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pelaksanaan K.13; (4) Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 207 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Kurikulum Madrasah; (5) Surat Edaran Dirjen Pendidikan Madrasah Nomor : SE/DJ.I/PP.00.6/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pelaksanaan Kurikulum pada Madrasah (MI/MTs/MA); (6) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 482 Tahun 2015 tentang Penetapan Madrasah Pendampingan K.13; dan (7) Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 1952 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru MATahun 2016. Dengan dasar peraturan perundangan tersebut madrasah, termasuk di dalamnya Madrasah Aliyah di Propinsi Kalimantan Barat memberlakukan K.13

Mekanisme Penetapan Kurikulum 2013

Proses penetapan kebijakan yang dilakukan terhadap implementasi Kurikulum 2013 (K.13) pada MA di Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Barat pada langkah awal adalah mengadakan koordinasi dengan Direktorat Madrasah, mengikuti Rakor nasional, mengirim guru dan kepala MA untuk mengikuti kegiatan tentang K.13, mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kemenag Kabupaten/Kota se Kalbar, kemudian mengadakan sosialisasi dan workshop tentang K.13 dan mendorong kepala dan guru MA mencari informasi atau bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan K.13. Sambil memantau kesiapan MA untuk melaksanakan K.13, maka MA yang siap agar menyampaikan surat ke Kemanag kabupaten/kota untuk diteruskan ke Kanwil Kemenag kemudian meninjau kesiapan MA tersebut, selanjutnya menyampaikan usulan ke Dirjen Pendidikan Islam untuk mendapatkan Keputusan Madrasah Pelaksana K.13.

Madrasah, utamanya MA Negeri harus siap

dengan implementasi K.13 (baik mapel umum maupun PAI-Bahasa Arab) Di tengah perjalanan (ujung semester ganjil 2014-2015 atau awal semester genap, oleh Dirjen Pendidikan Islam diputuskan implementasi K.13 hanya pada mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab. Adapun di Propinsi Kalimantan Barat, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi. Diperoleh usulan 19 MA seluruh tingkatan di Kalimantan Barat yang siap melaksanakan k 13 tahun pelajaran 2014–2015.

Yang menjadi dasar penetapan MA termasuk tutor, guru dalam mengimplementasikan K.13, adalah: (1) KMA No. 117 Tahun 2014 tentang Implementasi K.13 di Madrasah; (2) KMA No. 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab; (3) KMA No. 207 Tahun 2014 tentang Implementasi K.13 di Madrasah; (3) SK Dirjen Pendis No. 2676 Tahun 2013 tentang K.13 Mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab; dan (4) SK Dirjen Pendis No. 481 Tahun 2015 tentang Penetapan Madrasah Pendampingan Implementasi K.13. Adapun unsur yang terlibat dalam perumusan kebijakan Penetapan MA untuk mengimplementasikan K.13 di Wilayah Kemenag Propinsi Kalimantan Barat adalah; (1) Kepala Bidang Pendidikan Madrasah; (2) Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi; (3) Kasi Pendidikan Madrasah Kabupaten/Kota; dan (4) Kepala MA yang melaksanakan Implementasi K.13

Pembentukan Tim Kerja

Menurut Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Kator Kemeterian Agama Propinsi Kalimantan Barat, Tim Kerja Implementasi K.13 di Wilayah Kemenag Kalimantan Barat, dibentuk dalam rangka pelaksanaan K.13 di lingkungan madrasah, dan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu diserahkan kepada Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi. Adapun Tingkat Tim Kerja Implementasi K.13 ini dibentu pada Tingkat Kabupaten/Kota dan madrasah.

Unsur-unsur yang terlibat dalam Tim Implementasi K.13 di Wilayah Kemenag Kalimantan Barat adalah: (1) Pejabat Struktural, semua pejabat struktural di Kanwil Kemenag Kalimantan Barat, mulai dari Kakanwil, Kabid Madrasah, dan Kasi Kurikulum dan Evaluasi, di tingkat Kemenag Kepala Kemenag Kota/ Kabupaten dan Kasi Madrasah, mereka

merupakan unsur-unsur yang terlibat dalam implementasi K.13; (2) Pengawas Madrasah, terlibat dalam menjaga kualitas mutu implementasi K.13, melalui upaya pengawasan dan pembinaan secara akademis; (3) Kepala Madrasah, sebagai lider dalam mengawal, membina dan manjamin K.13 dapat diimplemetasikan di sekolah dan (4) Guru Madrasah, adalah ujung tombak implentasi K.13 di sekolah. Kinerja Tim Kerja Implementasi K.13 di Wilayah Kemenag Kalimantan Barat menurut Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi, hal ini telah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Demikian pula tingkat efektivitas kinerja Tim Kerja Implementasi K.13, maka dapat dibilang sudah efektif.

Desain Induk Implementasi K.13

Dalam melaksanakan desain K.13, Kanwil mempunyai kebijakan yaitu; (1) Melaksanakan Pelatihan-pelatihan, Bimbingan Teknis dan workshop yang diikuti oleh guru, kepala MA dan pengawas madrasah; (2) Pengadaan buku K.13 pada MA(Distribusi langung ke kabupaten/Kota); (3) Memberikan bantuan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan K.13; (4) Memprogramkan kegiatan pendampingan implementasi K.13; dan (5) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan pendampingan K.13.

Desain implementasi K.13, menurut Kabid MA Kankemenag Kalimantan Barat, adalah menjadikan MA Negeri untuk tahap 1 sebagai *pilot projects* K.13 sesuai: SK Dirjen Pendis No. 481 Tahun 2015 tentang Penetapan Madrasah Pendampingan Implementasi K.13; TP 2014-2015: Sebanyak 839 madrasah siap melaksanakan K 13 mata pelajaran umum dan PAI-Bahasa Arab.(atau sekitar di bawah 15 % dari total madrasah); TP 2015-2016: Seluruh madrasah negeri diwajibkan mengimplementasikan K.13 dan madrasah swasta yang memenuhi syarat; TP 2016-2017: Impelementasi K.13 harus berjumlah 15 % dari total madrasah baik negeri maupun swasta; TP 2017-2018: Impelementasi K.13 harus berjumlah 45 % dari total madrasah baik negeri maupun swasta; TP 2018-2019: Impelementasi K.13 harus berjumlah 100 % dari total madrasah baik negeri maupun swasta; dan TP 2019-2020: Serentak seluruh Indonesia mengimplementasikan K 13.

Proses Sosialisasi Desain Induk Implementasi

K.13 disosialisasikan hingga pada kesatuan pendidikan. Ini di tingkat wilayah dan daerah dilakukan melalui upaya: Sosialisasi, Workshop dan Bimtek Tingkat Provinsi; Sosialisasi, Workshop dan Bimtek Tingkat Kabupaten/Kota; dan melaksanakan pendampingan K.13 oleh KKM (DIPA di Madrasah Negeri) dan melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Madrasah. Adapun untuk pemahaman madrasah terhadap Desain Induk, menurut pejabat seksi kurikulum di Kanwil Kemenag, dalam hal ini madrasah telah berusaha untuk melaksanakan desain dari kemenag dengan mempersiapkan sarana dan prasarana, mengikutsertakan guru-gurunya mengikuti kegiatan K.13.

Penyusunan Dokumen

Untuk pembahasan tentang penyusunan dokumen, persoalan yang dibahas mencakup; Prosedur penyusunan dokumen, jenis dokumen yang di disusun, kualitas dokumen dan kesesuaian dengan dasar penetapan madrasah untuk kebutuhan, sosialisasi dokumen-dokumen implementasi K.13, kondisi pemahaman terhadap dokumen bagi Kanwil dan Satuan Pendidikan, keputusan distribusi dokumen (ketetapan dan Kebutuhan), pemahaman terhadap dokumen (Kanwil dan Satuan Pendidikan), dan Solusi yang dibutuhkan ketika terdapat persoalan dengan dokumen. Pembahasannya sebagaimana terdeskripsi di bawah ini menurut pihak pemangku kepentingan di daerah.

Jenis dokumen implementasi K.13 seperti buku pegangan guru, buku pegangan siswa. Buku-buku ini telah tersedia, Guru-guru yang melaksanakan K.13 tidak menyusun tersebut, hanya saja mereka mengadakan analisis terhadap buku-buku tersebut, baik oleh sendiri maupun melalui forum MGMP. Kualitas Dokumen implementasi K.13, menurut pemangku kepentingan daerah sebagian besar sudah sesuai dengan yang diperlukan. Terhadap sebagian kecil yang kurang sesuai diperlukan upaya analisis dan penyempurnaan dokumen tersebut melalui kegiatan analisa tersendiri.

Sosialisasi dokumen-dokumen implementasi K.13 (buku pegangan guru, pegangan peserta didik dll) telah dilakukan hingga kesatuan pendidikan, melalui kegiatan workshop dari tingkat provinsi, kabupten/kota dan sampai ke madrasah kemudian mengadakan analisis buku

siswa dan buku pegangan guru. Satuan pendidikan sasaran implementasi implementasi kurikulum 2013 menurut Kasi Kurikulum dan Evaluasi, hal ini mereka telah memahami dokumen tersebut. Setiap satuan pendidikan sudah memahami dokumen yang terkait dengan K.13.

Distribusi dokumen telah dilakukan baik ketetapan maupun sesuai kebutuhan. Menurut Pihak Kanwil, untuk buku siswa dan buku guru telah dikirim ke kabupaten/kota kemudian didistribusikan langsung ke madrasah. Berkaitan dengan satuan pendidikan yang menerima dokumen implementasi kurikulum 2013 terutama dalam pendistribusian buku siswa dan buku pegangan guru menurut pihak Kanwil tidak dapat dilaksanakan tepat waktu mengingat perusahaan pemenang lelang yang ditunjuk tidak bisa menyampaikan buku tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sampai ke provinsi pada bulan Desember, namun untuk pendistribusian ke daerah dapat diselesaikan dalam 1 bulan

Dokumen implementasi kurikulum 2013 telah dipahami oleh guru, peserta didik, dan semua yang terlibat dalam implementasi kurikulum 2013. Hal ini sesuai sebagaimana dikatakan oleh pihak Kemenag bahwa semua dokumen sudah difahami oleh guru, peserta didik, dan semua yang terlibat dalam implementasi kurikulum 2013 dan jika ada kendala mereka berkoordinasi secara hirarki melalui kepala madrasah, pengawas kemenag kabupaten/kota kemudian ke kanwil kemenag provinsi. Untuk mengatasi jika terdapat satuan pendidikan yang tidak menerima dokumen sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka menurut pihak Kemenag harus dilakukan koordinasi secara cepat dengan Kabupaten/Kota dan madrasah lain. Apabila terdapat kelebihan dapat didistribusikan ke madrasah yang belum mendapatkan jika masing-masing madrasah sudah tercukupi maka segera mendistribusikan langsung dari provinsi.

Penyiapan Ketenagaan

Untuk pembahasan tentang penyiapan ketenagaan ini, persoalan yang dibahas mencakup; Jenis Pelatihan yang Dilakukan, Prosedur Penetapan Pelatih, Pelatih/ nstruktur yang Terlibat, Keadaan Kompetensi Pelatih

(Kesesuaian dengan Keilmuan), Pendampingan Implementasi K.13, Uraikan tentang apa saja yang terlibat dalam Implementasi K.13, dan Evaluasi Implementasi K.13. Pembahasannya sebagaimana terdeskripsi di bawah ini menurut pihak pemangku kepentingan di daerah. Jenis-jenis Pelatihan ketenagaan yang telah dilakukan, diantaranya meliputi: kegiatan Sosialisasi, Workshop dan Bimtek K.13 Mata Pelajaran Agama dan Mata Pelajaran Umum Tingkat Provinsi; Sosialisasi, Workshop dan Bimtek K.13 Mata Pelajaran Agama dan Mata Pelajaran Umum Tingkat Kabupaten/Kota; Pendampingan K.13 oleh KKM (DIPA di Madrasah Negeri); dan Pelatihan K.13 kepada madrasah program Kemitraan Indonesia Australia.

Tahun 2015 seluruh madrasah negeri mendapatkan anggaran pendampingan/workshop K.13. Tahun 2015-2016 seluruh madrasah negeri (secara khusus) dan madrasah swasta yang sudah siap diwajibkan menerapkan/mengimplementasikan K.13. Yaitu madrasah yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2015, dan Madrasah Negeri yang mendapatkan alokasi anggaran program pendampingan Implementasi K.13. Diantara yang ditunjuk sebagai tenaga pelatih adalah Widyaiswara dari LPMP Kalbar, Widyaiswara dari Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Pengawas/Kepala Madrasah/Guru yang sudah mengikuti Pelatihan tingkat Nasional. Dasar pelaksanaan ini adalah Juknis Pelatihan Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Madrasah. Kompetensi tenaga Pelatih (kesesuaian dengan Keilmuan) yang terlibat dalam pelatihan, menurut pejabat Kanwil termasuk telah sesuai dengan Juknis, yaitu mereka yang sudah mengikuti Pelatihan Tingkat Nasional, pendidikan diutamakan strata 2 dan sudah bersertifikat.

Untuk tim implementasi K.13 secara legalitas belum terbentuk Tim implementasi K.13, namun secara fungsional kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Madrasah yang dikoordinir oleh Kepala Bidang dibantu Kasi Kurikulum. Untuk kegiatan pendampingan diserahkan langsung kepada Kepala madrasah negeri mendampingi seluruh guru-gurunya dan guru-guru di madrasah yang menjadi anggota KKM nya. Adapun untuk pendampingan, secara formal kegiatan pendampingan dilaksanakan selama 4

hari, namun secara fungsional dilaksanakan pembinaan dan pertemuan-pertemuan serta pemantauan secara kontinu kepada madrasah pelaksana implementasi K.13. Adapun untuk evaluasi Implementasi K.13 di madrasah, secara terstruktur belum pernah dievaluasi oleh pihak kanwil kemenag namun di monitoring oleh Tim dari Seksi Kurikulum. Adapun untuk implementasi K.13 di madrasah setiap pelaksanaannya melibatkan komite madrasah seperti dalam hal penambahan jam pelajaran sehingga siswa pulanginya tidak seperti biasa dan berimplikasi pada penambahan biaya penunjang untuk pembelajaran. Bahkan tidak hanya komite madrasah, pihak yayasan pun juga dilibatkan dalam implementasi K.13 ini.

Implementasi K.13 di MA

Untuk mengimplementasikan K.13, MA di Propinsi Kalimantan Barat mengembangkan kurikulum K.13 MA baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Pengembangan K.13 MA di Propinsi Kalimantan Barat melibatkan berbagai pihak, seperti kepala madrasah, guru, pengawas, komite madrasah, ahli, dan pihak-pihak lain yang terkait. Melalui pengembangan K.13 MA di Propinsi Kalimantan Barat, diharapkan MA dapat melaksanakan program pendidikan sesuai karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik.

Kegiatan pembelajaran dengan K.13 pada MA di Kalimantan Barat bertujuan: (1) mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreatifitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik; (2) madrasah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; (3) mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; (4) memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan dan ketrampilan; (5) kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi intikelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran; (6) kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi

dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti; dan (7) kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horisontal dan vertikal)

Beberapa MA di Propinsi Kalimantan Barat itu tersebar pada 7 MA di 3 Kabupaten /Kota. Untuk melihat implementasi K.13 MA di Prpopinsi Kalimantan Barat, dilakukan penilaian atau pendapat kepala MA, guru MA, pengawas dan komite sekolah, tentang implementasi K.13 tersebut.

Pendapat Kepala MA

Dalam implementasi K.13 pada beberapa MA di Propinsi Kalimantan Barat, kepala MA yang melibatkan tujuh orang, menyebutkan pendapatnya tentang K.13, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan dampak K.13 terhadap peserta didik, guru dan kepala MA itu sendiri. Pertama, pendapat tentang K.13. Isinya terkait pemahaman tentang tujuan dan pendekatan saintifik dalam K.13. Menurut kepala MAN 1 Pontianak, kepala MAN Model Singkawang, MAN Sintang, MAS Al-Maarif Sintang dan MAS Assalam Pontianak, mereka menyatakan sudah memahami semua isi kurikulum 2017. Kecuali kepala MAS IbnuTaimiyah Singkawang dan MAS Al-Fatah Singkawang yang kurang memahami.

Kedua, pendapat kepala sekolah tentang perencanaan pembelajaran PAI sesuai K.13 oleh guru madrasah. Isinya tentang kondisi guru-guru MA dalam pemahaman terhadap komponen RPP yang sesuai dengan K.13, dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum mengajar. Menurut kepala MAN 1 Pontianak, kepala MAS Assalam Pontianak, MAN Model Singkawang, MAN Sintang, MAS Al-Maarif Sintang, kepala MAS IbnuTaimiyah Singkawang dan MAS Al-Fatah Singkawang, mereka menyatakan bahwa sebagian besar kondisi guru-guru MA telah memahami komponen-komponen RPP, dan sudah membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum mengajar. Hanya sebagian kecil kondisi guru-guru MA kurang memahami komponen-komponen RPP, sehingga dalam pembuatan RPP

juga kurang sesuai yang diharapkan.

Ketiga, pendapat kepala MA tentang pelaksanaan pembelajaran PAI K.13 oleh guru madrasah. Isinya tentang tujuh aspek, yaitu: (1) para guru di MA mampu melaksanakan proses pembelajaran saintifik/ilmiah; (2) para guru di MA mampu melaksanakan proses pembelajaran yang menuju kompetensi ketrampilan (KI); (3) para guru di MA mampu melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi lebih sering bertanya; (4) para guru di MA mampu melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi lebih berani mengemukakan pendapat; (5) para guru di MA mampu melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi ingin melakukan observasi; (6) para guru di MA mampu melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi ingin melakukan eksperimen; dan (7) para guru di MA mampu memanfaatkan teknologi informasi yang ada di MA dalam proses pembelajaran. Menurut Kepala MAN 1 Pontianak MAN Model Singkawang, MAN Sintang, MAS Al-Maarif Sintang dan Kepala MAS Assalam Pontianak, terhadap 7 aspek tersebut secara umum guru-guru MA telah mampu melaksanakan pembelajaran sesuai K.13, walaupun belum mencapai kategori sangat mampu. Misalkan pada aspek kemampuan untuk melakukan proses pembelajaran yang menumbuhkan kreatifitas peserta didik, menurut Kepala MAN 1 Pontianak para guru madrasah dalam kategori mampu, berbeda menurut Kepala MAS Assalam yang menyatakan para guru MA masih dalam kategori kurang mampu, yaitu belum mencapai kategori mampu apalagi sangat mampu. Adapun untuk aspek ketepatan waktu guru dalam memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, menurut Kepala MAN 1 Pontianak ini guru MA dalam tingkatan sering, belum dalam tingkatan selalu. Berbeda menurut Kepala MAN Sintang, dan Kepala MAS Assalam, bahkan masih dalam tingkatan kadang-kadang, ini berarti belum mencapai tingkatan sering apalagi sangat sering.

Keempat, pendapat kepala MA tentang dampak K.13 terhadap peserta didik, guru dan kepala MA itu sendiri. Pendapat kepala MA tentang dampak K.13 terhadap peserta didik, yaitu Kepala MAN 1 Pontianak, MAN Sintang, dan

MAN Model Singkawang, tentang delapan pernyataan dalam kategori yakin, meski belum dalam kategori sangat yakin. Delapan pernyataan tersebut adalah; proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, murid menjadi lebih aktif bertanya dan mengemukakan pendapat, murid termotivasi untuk melakukan observasi, murid memiliki semangat belajar yang lebih tinggi, murid menjadi lebih terampil, inovatif dan produktif, murid memiliki daya nalar yang lebih baik, murid memiliki hasrat yang lebih tinggi untuk membaca, dan Karakter murid lebih terbangun (lebih sopan, jujur, menghormati perbedaan dll). Menurut Kepala MAS Assalam Pontianak, MAS Al-Maarif Sintang, MAS IbnuTaimiyah Singkawang dan MAS Al-Fatah Singkawang dari delapan pernyataan itu hanya 5 yang dalam kategori yakin, sedangkan yang tiga dalam kategori kurang yakin, belum kategori yakin apalagi sangat yakin. Diantara yang lima dalam kategori yakin itu adalah proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, murid menjadi lebih aktif bertanya dan mengemukakan pendapat, murid menjadi lebih terampil, inovatif dan produktif, murid memiliki daya nalar yang lebih baik, dan karakter murid lebih terbangun (lebih sopan, jujur, menghormati perbedaan dll).

Dampak implementasi K.13 terhadap guru, menurut kepala madrasah, yaitu Kepala MAN 1 Pontianak dan MAN Sintang, tentang Sembilan pernyataan dalam katagori yakin, meski belum dalam kategori sangat yakin. Sembilan pernyataan tersebut adalah; Guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru akan lebih bersemangat untuk menambah pengetahuan, guru akan lebih bersemangat mengembangkan metode pembelajaran, guru akan lebih bersemangat untuk memperkaya bahan ajar, guru akan lebih memperhatikan murid satu persatu, guru akan lebih obyektif dalam menilai kemampuan murid, guru akan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dan membangun karakter murid, guru merasa lebih mudah dalam menyusun RPP, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyusun RPP menjadi lebih singkat. Menurut Kepala MAN Model Singkawang, Kepala MAS Assalam, MAS IbnuTaimiyah Singkawang dan MAS Al-Fatah Singkawang,

dari sembilan pernyataan 6 yang dalam kategori yakin, sedangkan yang tiga dalam kategori kurang yakin, belum kategori yakin apalagi sangat yakin. Enam dalam kategori yakin itu adalah: Guru akan lebih bersemangat untuk menambah pengetahuan, guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru akan lebih bersemangat mengembangkan metode pembelajaran, guru akan lebih bersemangat untuk memperkaya bahan ajar, dan guru akan lebih memperhatikan murid satu persatu. Adapun ketiga pernyataan yang dalam kategori kurang yakin adalah guru akan lebih obyektif dalam menilai kemampuan murid, guru akan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dan membangun karakter murid, dan guru merasa lebih mudah dalam menyusun RPP, dan Waktu yang dibutuhkan untuk menyusun RPP menjadi lebih singkat. Adapun menurut Kepala MAS Al-Maarif Sintang, dari sembilan pernyataan ada lima yang dalam kategori yakin, sedangkan yang empat dalam kategori kurang yakin, belum kategori yakin apalagi sangat yakin.

Dampak implementasi K.13 terhadap kepala MA sendiri, menurut kepala madrasah, yaitu Kepala MAN 1 Pontianak, Kepala MAN Model Singkawang, Kepala MAN Sintang dan Kepala MAS Assalam, tentang lima pernyataan dalam kategori yakin, meski belum dalam kategori sangat yakin. Lima pernyataan tersebut adalah; Lebih aktif melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran di kelas, lebih aktif mendorong guru untuk konsisten menerapkan hal yang diperoleh di pelatihan dengan pelaksanaan di kelas, lebih termotivasi menjadi teman belajar para guru, lebih termotivasi mengadakan pelatihan mandiri untuk pengembangan kompetensi guru, dan lebih termotivasi mengembangkan manajemen sekolah. Untuk pendapat Kepala MAS Al-Maarif Sintang, dari lima pernyataan ada empat dalam kategori yakin dan satu kurang yakin yakni pada pernyataan tentang lebih termotivasi mengadakan pelatihan mandiri untuk pengembangan kompetensi guru. Adapun untuk pendapat kepala MAS IbnuTaimiyah Singkawang dan MAS Al-Fatah Singkawang, dari lima pernyataan ada empat dalam kategori yakin dan dua dalam kategori kurang yakin yakni pada pernyataan tentang

Lebih termotivasi mengadakan pelatihan mandiri untuk pengembangan kompetensi guru, dan Lebih termotivasi mengembangkan manajemen sekolah.

Pendapat Guru MA

Dalam implementasi K.13 pada MA di Propinsi Kalimantan Barat, guru MA yang melibatkan 28 orang menyebutkan pendapatnya tentang K.13, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan dampak K.13 terhadap peserta didik dan guru itu sendiri. Pertama, pendapat guru MA tentang K.13, meliputi aspek pemahaman guru tentang tujuan K.13, pendekatan tematik berbasis mata pelajaran, dan pendekatan saintifik penerapan K.13 dalam membentuk karakter peserta didik. Dalam aspek K.13, sebanyak 89.3% guru MA telah memahami pendekatan saintifik, diikuti sebanyak 75% guru MA telah memahami tujuan K.13, sebanyak 67.8 % guru MA dalam penerapan K.13 merasa efektif membentuk karakter peserta didik, dan sebanyak 64,3 % guru MA telah memahami pendekatan tematik berbasis mata pelajaran. Dari data tersebut menggambarkan bahwa guru MA sebagian besar telah memahami K.13, namun demikian masih terdapat sebagian kecil yang belum memahami K.13. Sehingga dibutuhkan pelatihan khusus agar supaya guru mampu memahami K.13.

Kedua, pendapat guru MA tentang perencanaan pembelajaran PAI sesuai K.13. Dalam aspek perencanaan pembelajaran, sebanyak 89.3 % guru telah membuat RPP sebelum mengajar, sebanyak 60.7 % guru MA telah memahami komponen RPP sesuai dengan K.13. Dari data tersebut menggambarkan bahwa guru MA sebagian besar telah membuat RPP, namun kurang diiringi dengan pemahaman terhadap komponen RPP sesuai dengan K.13. Sehingga dibutuhkan pelatihan khusus agar supaya guru mampu membuat perencanaan pembelajaran PAI sesuai K.13.

Ketiga, penilaian guru MA tentang pelaksanaan pembelajaran sesuai K.13. Dalam aspek pelaksanaan pembelajaran sesuai K.13, sebanyak 100% guru MA melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi lebih sering bertanya, diikuti 96.4 % guru MA melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi lebih berani

mengemukakan pendapat, sebanyak 92.9% guru MA memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, sebanyak 89.3% guru MA mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, sebanyak 82.1% guru MA mampu melakukan proses pembelajaran yang menumbuhkan kreatifitas peserta didik, sebanyak 78.6 % guru MA guru mampu melaksanakan proses pembelajaran saintifik/ilmiah, sebanyak 64.3% guru MA guru mampu melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi ingin melakukan eksperimen, sebanyak 50% guru MA mampu menggunakan pendekatan tematik dalam proses pembelajaran.

Keempat, pendapat guru tentang dampak K.13 terhadap peserta didik. Dalam aspek dampak K.13 terhadap peserta didik, sebanyak 92.9% guru MA mengatakan bahwa proses pembelajaran PAI lebih menarik dan menyenangkan, 85.7% guru MA mengatakan bahwa peserta didik menjadi lebih aktif bertanya dan mengemukakan pendapat, dan 85.7% guru MA mengatakan bahwa peserta didik memiliki hasrat yang lebih tinggi untuk membaca. Selanjutnya 78.6% guru MA mengatakan bahwa peserta didik menjadi lebih terampil, inovatif dan produktif, serta 78.6% guru MA mengatakan bahwa peserta didik memiliki daya nalar yang lebih baik. Adapun 67.9% guru MA mengatakan bahwa peserta didik memiliki semangat belajar yang lebih tinggi, dan karakter peserta didik lebih terbangun (lebih sopan, jujur, menghormati perbedaan), dan peserta didik termotivasi untuk melakukan observasi. Keadaan ini termasuk dalam kategori cukup baik, belum kategori baik, sangat baik dan memuaskan.

Dampak K.13 terhadap guru madrasah.

Berdasarkan table tersebut di atas, dapat dipahami bahwa enam aspek dari dampak K.13 terhadap guru menurut pendapat guru MA, sudah pada keadaan yang menyenangkan, yaitu guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru akan lebih bersemangat untuk menambah pengetahuan, guru akan lebih bersemangat mengembangkan metode pembelajaran, guru akan lebih bersemangat untuk memperkaya bahan ajar, guru akan lebih obyektif dalam menilai kemampuan murid, dan guru akan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan

pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dan membangun karakter murid, dengan masing-masing prosentase 96.4%, 96.4%, 85.7%, 89.3%, 89.3%, dan 92.9%. Keenam aspek tersebut termasuk dalam kategori sangat baik meski belum memuaskan. Keadaan berikutnya menurut pendapat guru terdapat 78.6% guru akan lebih memperhatikan murid satu persatu. Keadaan aspek tersebut termasuk dalam kategori baik, belum sangat baik dan belum memuaskan. Keadaan yang berada dalam kategori kurang baik terdapat pada pendapat guru pada aspek guru merasa lebih mudah dalam menyusun RPP dan waktu yang dibutuhkan untuk menyusun RPP menjadi lebih singkat dengan masing-masing 42.9%. Keadaan ini termasuk dalam kategori kurang baik, belum mencapai kategori cukup baik, baik, sangat baik apalagi memuaskan.

Pendapat Pengawas Madrasah

Dalam implementasi K.13 di Propinsi Kalimantan Barat menurut pendapat pengawas MA yang melibatkan 3 orang yang ada, menyebutkan pendapatnya terhadap K.13, buku teks pelajaran, buku pedoman guru, pembelajaran saintifik, penilaian otentik dan pelatihan K.13. Pertama, pendapat pengawas MA terhadap K.13, terdapat dua orang yang merasa kurang memahami tentang K.13 dan satu pengawas telah paham terhadap K.13.

Kedua, pendapat pengawas MA tentang buku teks pelajaran. Menurut dua pengawas MA telah cukup memahami buku teks pelajaran, sementara satu pengawas MA berpendapat kurang dapat memahami buku teks pelajaran. Terhadap pernyataan apakah contoh-contoh kegiatan yang ada dalam buku teks pelajaran itu mudah dilakukan oleh peserta didik, maka menurut dua pengawas MA agak mudah dilakukan oleh peserta didik. Adapun satu pengawas MA berpendapat sulit dilakukan oleh peserta didik. Untuk pendapat pengawas MA tentang penggunaan bahasa dalam buku tersebut, satu pengawas MA berpendapat mudah dipahami, sementara dua pengawas MA berpendapat kurang dapat dipahami. Namun demikian, menurut tiga pengawas MA berpendapat bahwa buku teks pelajaran dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran.

Ketiga, pendapat pengawas MA tentang buku pedoman guru. Menurut tiga pengawas MA

berpendapat bahwa buku pedoman guru sudah cukup dipahami. Terhadap pernyataan bahwa buku pedoman guru dapat memberikan panduan yang jelas tentang penerapan pembelajaran tematik berbasis mata pelajaran, dua pengawas MA berpendapat telah cukup jelas, sementara satu pengawas berpendapat kurang jelas. Pendapat pengawas MA tentang buku pedoman guru dapat memberikan panduan yang jelas tentang penerapan pelajaran saintifik, maka menurut tiga pengawas MA sudah cukup jelas. Pendapat pengawas MA tentang buku pedoman guru dapat membantu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di kelas, maka menurut dua pengawas MA cukup membantu, sementara menurut satu pengawas MA kurang cukup membantu.

Keempat, pendapat pengawas MA tentang pelatihan K.13 untuk pengawas MA. Menurut pengawas MA, pelatihan K.13 untuk guru MA dilakukan lebih awal dibandingkan pelatihan K.13 untuk pengawas MA. Dalam pelatihan K.13 untuk pengawas MA, maka menurut 3 pengawas MA masih kurang sesuai antara materi pelatihan dengan kebutuhan pembelajaran dalam K.13. Untuk pendapat pengawas MA bahwa materi pelatihan telah mencakup seluruh standar proses, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan, dua pengawas berpendapat sudah cukup mencakup dan satu pengawas MA berpendapat kurang mencakup. Terhadap pernyataan bahwa materi pelatihan telah mencakup standar kompetensi lulusan, maka menurut tiga pengawas sudah cukup mencakup. Adapun terhadap pernyataan bahwa setelah mengikuti pelatihan, pengawas MA merasa telah memperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan pembelajaran sesuai K.13, maka menurut dua pengawas MA sudah jelas dan satu pengawas MA berpendapat kurang jelas.

Pendapat Komite Sekolah

Dalam implementasi K.13 di Propinsi Kalimantan Barat menurut pendapat komite MA yang melibatkan 7 orang dari 7 MA yang menyebutkan pendapatnya tentang pelaksanaan K.13, pengaruh metode pembelajaran yang diterapkan dalam K.13 terhadap peserta didik, dan usulan perbaikan terhadap implementasi K.13. Pertama, pendapat komite sekolah tentang pelaksanaan K.13. Komite sekolah telah

mengetahui adanya penerapan K.13, dan adanya kemudahan belajar bagi peserta didik dalam K.13 di MA. Ini menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Untuk keterlibatan komite MA dalam implementasi K.13, maka mereka merasa belum banyak terlibat.

Kedua, pendapat Komite MA tentang pengaruh metode pembelajaran yang diterapkan dalam K.13 terhadap peserta didik. Menurut komite MA, terdapat pengaruh yang positif metode pembelajaran yang diterapkan dalam K.13 terhadap peserta didik. Ini menunjukkan adanya keadaan yang menggembirakan. Dengan penerapan K.13 peserta didik menjadi lebih aktif bertanya, senang mengemukakan pendapat, dan dapat membangun karakter peserta didik. Peserta didik juga merasa termotivasi untuk melakukan observasi, menjadi terampil dan kreatif, serta mendorong hasrat yang lebih tinggi untuk membaca.

D. PENUTUP

Simpulan

Proses penetapan kebijakan implementasi K.13 di Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat yaitu, diawali mengadakan koordinasi dengan Direktorat Madrasah, mengikuti Rakor nasional, mengirim guru dan kepala MA mengikuti kegiatan tentang K.13, mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kemenag Kabupaten/Kota se Kalbar, kemudian mengadakan sosialisasi dan workshop tentang K.13 dan menetapkan 19 madrasah sebagai *pilot projek* implementasi K.13 se Kalbar. Dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 482 Tahun 2015 tentang Penetapan Madrasah K.13, maka Tahun Pelajaran 2014/2015 memberlakukan K.13 Termasuk untuk mata pelajaran Agama Islam (Al-Qur'an Hadits, SKI, Akidah Akhlak, Fikih, Bahasa Arab, Ilmu Hadits, Ilmu Tafsir, Ilmu Kalam, Akhlak) menggunakan K.13.

Pembahasan perspektif implementasi K.13, melibatkan penilaian atau pendapat kepala MA, guru madrasah, peserta didik, komite sekolah dan pengawas madrasah, yang menyebutkan pendapatnya terhadap kurikulum, proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan dampak K.13 pengaruh terhadap peserta didik, guru dan kepala madrasah. Dalam penerapan

K.13, sebagian besar guru MA merasa efektif membentuk karakter peserta didik, dan sebagian guru baru memahami pendekatan tematik berbasis mata pelajaran dengan kategori cukup baik/ cukup tinggi, belum mencapai kategori tinggi, sangat tinggi, dan jauh dari memuaskan.

Keadaan ini dirasakan juga oleh siswa dalam semangat belajar yang lebih tinggi, dan karakter peserta didik lebih terbangun (lebih sopan, jujur, menghormati perbedaan dll), yaitu dalam kategori cukup, belum kategori baik, sangat baik dan apalagi memuaskan.

Saran

Kebijakan implementasi K.13 di Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, untuk *pilot project* terhadap 19 madrasah, adalah prioritas, namun kebijakan kedua setelah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 482 Tahun 2015 tentang Penetapan Madrasah Pendampingan K.13, maka Tahun Pelajaran 2014/2015 memberlakukan K.13 namun keberadaannya perlu ditopang kesiapan yang matang mengingat dalam implementasi K.13 se Kalbar banyak ditemui kendala.

Dalam penerapan K.13, se Kalbar tingkat efektifitasnya pada kategori cukup baik/ cukup tinggi, belum mencapai kategori tinggi, sangat tinggi, dan memuaskan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan mutu implementasi penerapan K.13 melalui berbagai upaya pembinaan baik pelatihan, seminar dan workshop.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008.
- Abidin, Y. *Desain sistem pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013*. Bandung: Rafika Aditama, 2013.
- Daryanto. *Pendekatan pembelajaran saintifik Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Gava Media.
- DeLeon P. "The missing link revisited: contemporary implementation research." *Policy Studies Review* 16 (2006).
- Dunn, W.N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah mada University Press, terjemahan Samodra W, Diah Asitadani, Erwan AP, Edisi Kedua, 2000.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2004.
- Dye, Thomes R. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall: Englewood Cliffs, 1981.
- Fadlillah, M. *Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Hosnan, M. *Pendekatan saintifik dan kontekstua ldalam pembelajaran abad21: kunci sukses implementasi Kurikulum 2013*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Implementasi dan Evaluasi Kurikulum 2013*. http://kurikulum2013indonesia.blogspot.com/2013/12/___implementasi-kurikulum-2013.html (diakses 8 Juli 2018).
- Implementasi Kurikulum 2013*. <https://annisarosmma.wordpress.com/2014/07/10/> (diakses 8 Juli 2018).
- Kunandar. *Penilaian autentik: penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan Kurikulum 2013*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Lie, A. *Kooperatif learning (mempraktikkan cooperative Learning di ruang-ruang Kelas)*. Jakarta: Grasindo, 2012.
- Matsur. "Implementasi K.13 dalam Pelaksanaan Pembelajaran di SMP." *Jurnal Inovasi TP* 4: (2017): 50-64.
- Mendikbud RI. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian (2013).
- Mendikbud RI. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (2013).
- Naskah Akademik Kuriukulum 2013, Kemendikbud RI Tahun 2013.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 1994.
- Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Sudarsono, *Beberapa Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1992.

**ASSESSMENT STUDIES RELIGIOUS
EDUCATIONAL EDUCATION
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH
(MDT) IN HONG KONG**

IYOH MASTIYAH

ABSTRACT

This study describes the pilot project of religious education in the form of Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) in Hong Kong. The findings show that Islamic Religious Education in HK has developed both in the form of organizations and Islamic teaching circles (Majelis Taklim). However their roles are considered limited, for they only provide religious education for adults and for children. This situation is due to the lack of competent teachers of Islamic subjects. Islamic Religious Education for children is available at the Consulate General office although the supporting factors are still limited. To boost further development, a stakeholder committee of the madrasah has been formed by taking into account all potentials and opportunities.

KEY WORDS: Pioneer, diversity education, Madrasah Diniyah Takmiliyah

**STUDI ASESMEN RINTISAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH
(MDT) DI HONG KONG**

ABSTRAK

Studi ini mendeskripsikan rintisan pendidikan keagamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Hong Kong. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Pendidikan Keagamaan di HK cukup menggembirakan terbukti banyaknya lembaga Pendidikan Keagamaan baik dalam bentuk organisasi maupun Majelis Taklim yang kegiatan cukup semarak. Namun peranannya dalam pendidikan keagamaan Islam masih terbatas, baik untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Karena kurangnya tenaga ustadz yang memiliki kompetensi di bidang agama. Walaupun Pendidikan Keagamaan Islam bagi anak-anak

telah tersedia di KJRI, namun kondisinya masih terbatas. Oleh karena itu berdasarkan peluang dan potensi yang tersedia, telah disepakati adanya rintisan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang diikuti komitmen (agreement) dengan terbentuknya stakeholder atau tim penyelenggara rintisan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Hong Kong.

KATA KUNCI: Rintisan, pendidikan keagamaan, Madrasah Diniyah Takmiliyah

**CASE STUDY ON CURRICULUM
IMPLEMENTATION 2013 IN SOME
MADRASAH ALIYAH IN WEST
KALIMANTAN PROVINCE**

ACHMAD DUDIN

ABSTRACT

This paper is the result of a case study in 2016. The study was overshadowed by the implementation of the 2013 curriculum in Islamic Senior High School (Madrasah Aliyah). It was conducted in several Madrasah Aliyahs in the Province of West Kalimantan. The data and information were collected using qualitative-evaluative study through qualitative and descriptive approach. The study is mainly based on some accounts of various parties involved in the implementation of the 2013 curriculum (K.13), such as the principles, teachers, supervisors and madrasah committees. The findings of this research indicate that the implementation of K.13 in the provincial office of Ministry of Religious Affairs as the pilot project in 19 MAs is a priority, but the second policy after the issuance of the General Director of Islamic Education Regulation no. 482 Th. 2015 on the peer Madrasah for the implementation of K.13 in the academic year 2014/2015. However, this initiative needs to consider the level of readiness among the MAs in the province due to the unavoidable local obstacles.

KEY WORDS: Evaluation, implementation, curriculum 2013, Madrasah Aliyah

STUDI KASUS IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA BEBERAPA MADRASAH ALIYAH DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil studi kasus tahun 2016. Latar belakang dari studi kasus ini adalah adanya persoalan implementasi kurikulum 2013 di madrasah aliyah, yang menuntut perbaikan. Studi ini mengambil kasus di beberapa MA di Propinsi Kalimantan Barat. Data dan informasi diperoleh melalui studi kualitatif evaluatif, dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Hasil studi ini, merupakan penilaian atau pendapat dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kurikulum 2013 pada beberapa MA di Propinsi Kalimantan Barat, seperti kepala MA, guru, pengawas, dan komite madrasah. Temuan penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan implementasi K.13 di Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, untuk pilot project terhadap 19 MA, adalah prioritas, namun kebijakan kedua setelah diterbitkannya Peraturan Dirjen Pendis Kemenag No. 482 Th. 2015 tentang Penetapan Madrasah Pendampingan K.13, maka Tahun Pelajaran 2014/2015 memberlakukan K.13 namun keberadaannya perlu ditopang kesiapan yang matang mengingat dalam implementasi K.13 se Kalbar banyak ditemui kendala.

KATA KUNCI: Evaluasi, implementasi, kurikulum 2013, Madrasah Aliyah

READING INTEREST AND LITERATURE OF THE TEACHERS OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION IN SENIOR HIGH SCHOOL IN TANGERANG CITY, BANTEN

ASEP SAEFULLAH

ABSTRACT

This paper discusses reading materials on religious topics consumed by the teachers of Islamic Religious Subject (Pendidikan Agama Islam [PAI]) in Senior High

*School (Sekolah Menengah Atas [SMA]) in Tangerang City, Banten Province. The teachers seem not to take benefit from Religious books as enriching literatures for the teaching of Islamic education materials. To glean the data, the study used questionnaires and interviews. The respondents of the study were 28 teachers of PAI. The study found that there were mainly two titles of the religious literatures commonly used by the teachers: *Fiqh Sunnah*, by Sayyid Sabiq, was mentioned 10 times, and *Fiqh Islam*, by Sulaiman Rashid was mentioned seven times. The study disclosed the facts that the teachers have no sufficient literatures on the studies of *Qur'an*, *Hadith*, *Aqidah*, *Morals*, and *History of Islamic Culture*. These areas were only mentioned once at average. The issue of "reading interest," may be "low" in the context of enriching the subject materials, but it was "quite high" when associated with religious knowledge enrichment for everyday life.*

KEY WORDS: Reading interest, religious literatur, PAI, SMA, PAI Teachers, Tangerang

MINAT BACA DAN LITERATUR GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SMA DI KOTA TANGERANG, BANTEN

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tema bahan bacaan keagamaan guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA di Kota Tangerang Banten. Buku bacaan keagamaan sebagai literatur pengayaan bagi para guru PAI SMA, khususnya di Kota Tangerang Banten tergolong masih sedikit dimanfaatkan. Metode pengumpulan data digunakan angket dan wawancara. Jumlah responden sebanyak 28 orang guru PAI. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa buku bacaan keagamaan yang relatif sering disebutkan hanya dua judul, dan keduanya untuk materi pembahasan fikih, yaitu *Fiqh Sunnah*, karya Sayyid Sabiq, disebutkan 10 kali, dan *Fiqh Islam*, karya Sulaiman Rasyid disebutkan tujuh kali. Temuan lain adalah minimnya referensi untuk materi-materi Al-Qur'an, Hadis, Akidah, Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), rata-rata hanya disebutkan satu kali. Persoalan "minat baca", bisa jadi "minim" dalam konteks memperkaya

wawasan untuk menambah materi pembahasan mata pelajaran PAI, tetapi “cukup tinggi” jika dikaitkan dengan penambahan pengetahuan agama untuk kehidupan sehari-hari.

KATA KUNCI: Minat baca, literatur keagamaan, PAI, SMA, guru PAI, Tangerang

OUTSTANDING MADRASAH WITH BILINGUAL CLASS

FARIDAHANUN

ABSTRACT

This qualitative study on Outstanding Madrasah with bilingual classes is aimed to reveal how the implementation of Bilingual class programs is conducted at State Primary Madrasah (MIN) I South Tangerang City. The findings indicate that: (a) the implementation of bilingual class program is projected to prepare the generation with foreign language proficiency, (b) bilingual program is supported by collaboration with Cambridge International Institute, the roles of madrasah committee and the support of madrasah headmaster in the quality of education, (c) the inhibiting problem of bilingual class with cooperative model is time consuming and sufficient infrastructure and learning resources, (d) Ministry of Religious Affairs should pay attention to the madrasah facilities that apply a bilingual class program for a better learning process.

KEY WORDS: Madrasah, achievement, bilingual class

MADRASAH BERPRESTASI DENGAN KELAS BILINGUAL

ABSTRAK

Penelitian Madrasah Berprestasi dengan kelas bilingual bertujuan mengetahui pelaksanaan program kelas Bilingual di MIN I Kota Tangerang Selatan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) penyelenggaraan program kelas bilingual menghasilkan generasi penerus yang berkualitas dan menguasai bahasa asing, (b) faktor pendukung program bilingual adalah adanya

jaringan kerjasama dengan Lembaga Cambridge International, peranan komite madrasah dan dukungan kepala madrasah terhadap peningkatan kualitas pendidikan, (c) faktor penghambatnya yakni pembelajaran bilingual dengan model kooperatif membutuhkan waktu yang lebih banyak, belum lengkap sarana prasarana dan sumber belajar, (d) Kementerian Agama harus memperhatikan kebutuhan sarana prasarana madrasah penyelenggara program kelas bilingual sehingga dapat menunjang pembelajaran menjadi lebih baik.

KATA KUNCI: Madrasah, berprestasi, kelas bilingual

IMPROVING THE PEDAGOGICAL COMPETENCE OF MADRASA'S TEACHERS THROUGH A HIGH QUALITY OF TRAINING

AGUSTINA

ABSTRACT

In line with this, this research then aimed to evaluate the training programs and whether or not the trainings had effect on the teachers' pedagogical competence. To collect the data, this study used a questionnaire and a test to measure the pedagogical competence. The questionnaire was distributed to 104 teachers at MORA Training Institute in Palembang. Some findings showed that the implementation of teachers' training by the committee was in "good" category, but the aspect of curriculum and syllabus was in "not good" category; the trainers' roles in the learning process was in "very good" category; the teachers' pedagogical competence before and after the training significantly improved but the indicator of students' potential development was in less good category. This study suggested that the curriculum designer should improve the quality of curriculum based on teachers' needs and take into account the students' potential development for the training materials.

KEY WORDS: Madrasahs' teachers, training, pedagogical competence

PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU MADRASAH MELALUI DIKLAT BERKUALITAS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program diklat guru madrasah dan dampaknya terhadap kompetensi pedagogik guru, menggunakan metode studi kasus terhadap 104 guru pada Balai Diklat Keagamaan Palembang dengan instrumen kuisioner, test pengetahuan pedagogik dan observasi performa pedagogik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diklat guru dari aspek penyelenggara dinilai baik namun salah satu indikatornya yaitu kualitas kurikulum dan silabus (kursil) dinilai kurang baik; implementasi diklat guru dari aspek widyaiswara dinilai sangat baik; kompetensi pedagogik guru pasca diklat dilihat dari praktik mengajar dinilai baik namun satu indikatornya yaitu pengembangan potensi peserta didik kurang baik dan terdapat peningkatan pengetahuan pedagogik guru pasca diklat seperti yang ditunjukkan pada uji T dari pre dan post test. Direkomendasikan pada para pengembang kurikulum diklat guru untuk meningkatkan kualitas kursil sesuai dengan kebutuhan guru dan memberikan penekanan substansi pengembangan potensi peserta didik dalam diklat-diklat teknis substantif pendidikan.

KATA KUNCI: Guru madrasah, Diklat, kompetensi pedagogik

REFLECTIONS ON MOTHER TONGUE CONDITIONS IN INDONESIA THROUGH MEDIA TEXT ANALYSIS

VILYA LAKSTIAN CATRA MULIA

ABSTRACT

Text analysis becomes one of many approaches to analyze the dynamics of mother tongue issues whose condition is relatively appalling. Mother tongue (language) is the earliest language acquired by a member of society starting from the cradle of family. Because of its proximity, mother language is close to local language.

However, its popularity is less than Bahasa Indonesia and foreign languages. It is reflected on the related texts in media for International Mother Language Day (IMLD). This is descriptive qualitative type of research using criteria-based sampling along with content analysis technique to the related texts of IMLD in the daily printed national newspaper, Kompas. The researcher used Systemic Functional Linguistics to obtain interpersonal: transactional meanings through mood structure analysis from narration, reports, and quotations. Based on the analysis, the study investigated the attitudes presented by participants in the texts to their readers from analysis results of modalization and modulation. This research concluded that the texts were more dominated by language meanings with transaction on information rather than action. This affected on the modes of delivering messages informatively and the orientation of enriching the insights.

KEY WORDS: Mother language, local language extinction, mood structure, texts

REFLEKSI KONDISI BAHASA IBU DI INDONESIA MELALUI ANALISIS TEKS MEDIA

ABSTRAK

Analisis teks menjadi salah satu pendekatan untuk menemukan dinamika bahasa ibu yang kini dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahasa ibu merupakan bahasa yang paling dekat dan awal diterima masyarakat mulai dari lingkup keluarga. Karena kedekatan itu, bahasa ibu erat kaitannya dengan bahasa daerah. Namun, kepopulerannya kalah dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kondisi ini tampak pada teks-teks di media terkait peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional (HBII). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tehnik cuplikan berkriteria serta dikaji dengan tehnik analisis isi terhadap teks-teks terkait HBII pada koran harian cetak nasional, *Kompas*. Peneliti menggunakan pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional untuk memperoleh makna interpersonal: transaksional melalui analisis struktur *mood* pada narasi, pelaporan, dan kutipan. Dari analisis tersebut, dieksplorasi juga sikap yang dihadirkan pelibat teks kepada pembacanya dari hasil analisis modalisasi dan modulasi. Penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa teks-teks tersebut

didominasi oleh makna bahasa dengan transaksi informasi daripada tindakan. Hal ini berdampak pada penyajiannya yang secara informatif dan berorientasi pada menambah wawasan.

KATA KUNCI: Bahasa ibu, kepunahan bahasa daerah, struktur *mood*, teks

THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION AND TRAINING PROGRAMS FOR THE MTS' ENGLISH TEACHERS

HENDRI

ABSTRACT

Improving the quality of technical staffs of religious affairs or teachers has been an essential factor in the Human Resources development at the Ministry of Religious Affairs. An effective education and training programs can lead to the positive results that are concomitant with the intended goals. This study aims to measure the effectiveness of education and training programs for English teachers at Religious Training Center Padang in 2017. It is based on descriptive quantitative method utilizing questionnaire and documentation techniques to collect the data. To analyze the effectiveness of education and training programs, Kirkpatrick's theory is used to investigate responses, learning and behavior. This study found that the basic training for English Teachers which was by the Religious Training Center of Padang City from 14th up to 26th of September 2017 was conducted effectively at the success rate of 86,8%.

KEY WORDS: Effectiveness, quality, education and training

EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU BAHASA INGGRIS MTS

ABSTRAK

Peningkatan mutu tenaga teknis Keagamaan atau tenaga pendidik menjadi poin penting dalam

pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Agama. Efektivitas dalam pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan pengaruh yang tepat, akurat, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris MTS Tingkat dasar Tahun 2017 di Balai Diklat Keagamaan Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui Angket dan Studi Dokumentasi. Pengukuran efektivitas pendidikan dan pelatihan menggunakan metode/teori Kickpatrick yaitu reaksi (*reaction*) atau tanggapan, pembelajaran (*learning*) dan perilaku (*behavior*). Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan Guru mata pelajaran bahasa Inggris MTS Tingkat Dasar Tahun 2017 yang dilaksanakan di kampus Balai Diklat Keagamaan Padang mulai tanggal 14 sampai dengan 26 September 2017 telah terlaksana dengan kategori efektif dengan persentase keberhasilan efektivitas 86, 87 % .

KATA KUNCI: Efektivitas, mutu, pendidikan dan pelatihan

THE COMMUNITY BASED MOSQUE MANAGEMENT INDEX IN TRENGGALEK REGENCY, EAST JAVA

ROSIDIN

ABSTRACT

The mosque is a center for community development that needs to be well managed. This paper sheds light on the index of and the priority aspects of mosque management in Trenggalek Regency. The research takes benefit of quantitative analysis. Validity and reliability test determined 26 items in the questionnaire. The study involved 100 respondents as sample obtained by random sampling method. The management principles that are analyzed consist of planning, organizing, actuating and controlling. The data were processed using excel program. The study showed that: 1) The index of mosque management in Trenggalek Regency was 70,25 at good

category; 2) The Overall management principles implemented were at the category of good. Out of the four principles, the actuating principle was at the lowest category of 63.50 although it was still considered good. Therefore, the study suggested the priority of improvement without neglecting the other aspects of management.

KEY WORDS: Management, index, mosque, and society

INDEKS PENGELOLAAN MASJID BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN TRENGGALEK JAWA TIMUR

ABSTRAK

Masjid merupakan sentra pembinaan masyarakat pemeluk Islam sehingga harus dikelola dengan baik. Tulisan ini menggambarkan indeks pengelolaan masjid dan menganalisis aspek prioritas pengelolaan masjid di Kabupaten Trenggalek. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Pengujian validitas dan reliabilitas menghasilkan 26 item yang valid dan reliable untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Jumlah sampel yang terlibat dalam penelitian adalah 100 yang didapatkan dengan metode random sampling. Aspek pengelolaan masjid yang dianalisis meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Data yang diperoleh diolah menggunakan excel. Hasil penelitian menyatakan: 1) Indeks pengelolaan masjid di Kabupaten Trenggalek sebesar 70,25 masuk kategori baik; 2) Semua aspek pengelolaan yang diteliti berkategori baik. Dari keempat aspek, pelaksanaan mempunyai point terendah. 3) Aspek pengelolaan masjid terendah adalah pelaksanaan sebesar 63,50 masih masuk kategori baik, sehingga prioritas perbaikan, tanpa mengabaikan aspek lain

KATA KUNCI: Indeks pengelolaan, masjid, masyarakat Trenggalek

PENJAROAN RAJAB IN SAKATUNGGAL MOSQUE AT CIKAKAK VILLAGE: A STUDY OF LOCAL WISDOM

NOVITA SISWAYANTI

ABSTRACT

This paper attempts to describe how local wisdom is maintained in the ceremony of Penjaroan Rajab in Sakatunggal Mosque, Cikakak Village. The research was conducted using qualitative method with anthropological and historical approaches. This study is to identify the contestation of local wisdom in community ceremonies of Penjaroan Rajab where values are strongly planted in the community behavior, religious systems and beliefs. It finds that Penjaroan Rajab is a grave visit ritual that is conducted every 26th of the month of Rajab as a symbol of respect to the deceased Kiai Mustholih (the founder of the village). This ritual is marked by the replacement of fences surrounding the graveyard, slametan ngalap berkah (ritual meal to invoke blessing), Islamic sermons, and cultural performances. This ritual preserves the local wisdom of the Cikakak community including sincerity, harmony, religiosity and nationalism that melt people from different places and religions into the color of togetherness.

KEY WORDS: Local wisdom, penjaroan Rajab, grave pilgrimage

PENJAROAN RAJAB DI MASJID SAKATUNGGAL CIKAKAK: SEBUAH KAJIAN KEARIFAN LOKAL

ABSTRAK

Artikel ini berupaya mendeskripsikan kearifan lokal yang ada pada ritual Penjaroan Rajab di Masjid Saka Tunggal Desa Cikakak. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan antropologis dan historis. Penelitian untuk mengidentifikasi kearifan lokal pada ritual Penjaroan Rajab melalui nilai-nilai yang terdapat pada perilaku masyarakat, sistem agama dan kepercayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penjaroan Rajab adalah

ritual ziarah kubur setiap tanggal 26 Rajab sebagai simbol penghormatan kepada leluhur Kiai Mustholih. Ritual ini ditandai dengan penggantian pagar yang mengelilingi pemakaman, slametan ngalap berkah, pengajian, dan pentas budaya. Ritual ini melestarikan kearifan lokal masyarakat Cikakak meliputi keikhlasan, kerukunan, keberagaman, dan

nasionalisme sebagai elemen perekat lintas warga dan lintas agama yang memberikan warna kebersamaan

KATA KUNCI: Kearifan lokal, penjaroran Rajab, ziarah kubur

A

Achmad Dudin

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Jl. MH Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. Email: achmad.dudin@gmail.com

“STUDI KASUS IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA BEBERAPA MADRASAH ALIYAH DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.1, Juli 2018. hal: 19-34

Agustina

Balai Diklat Keagamaan Palembang, Jalan Demang Lebar Daun-Macan Kumbang No 4436 Palembang, e-mail: agustinadjihadi.ad@gmail.com

“PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU MADRASAH MELALUI DIKLAT BERKUALITAS”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.1, Juli 2018. hal: 65-74

Asep Saefullah

Puslitbang Lektor, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi; asepfm@yahoo.com; <https://scholar.google.co.id/citations?user=1NUmAr4AAAAJ&hl=id&oi=ao>

“MINAT BACA DAN LITERATUR GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SMA DI KOTA TANGERANG, BANTEN”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.1, Juli 2018. hal: 35-52

F

Farida Hanun

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. E-Mail: farida_ridwan@yahoo.com

“MADRASAH BERPRESTASI DENGAN KELAS BILINGUAL”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.1, Juli 2018. hal: 53-64

H

Hendri

Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Padang, Jl. Batang Kapur No. 7 Sumatera Barat. Email: hendrihendri727@yahoo.com

“EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU BAHASA INGGRIS MTS”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.1, Juli 2018. hal: 87-100

I

Iyoh Mastiyah

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jl. MH. Thamrin N0. 6 Jakarta. Email: mastiyah9@gmail.com

“STUDI ASESMEN RINTISAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH (MDT) DI HONG KONG”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.1, Juli 2018. hal: 1-18

N

Novita Siswayanti

Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. E-mail: pi Piet1515@gmail.com
"PENJAROHAN RAJAB DI MASJID SAKATUNGGAL CIKAKAK: SEBUAH KAJIAN KEARIFAN LOKAL"

Jurnal Dialog Vol. 41, No.1, Juli 2018. hal: 111-120

Nasrullah Nurdin

Peminat Masalah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jalan M.H. Thamrin 6 Jakarta.

"KHAZANAH BUDAYA KEAGAMAAN KASUNANAN SURAKARTA"

Jurnal Dialog Vol. 41, No.1, Juli 2018. hal: 121-124

R

Rosidin

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Jl. Untung Suropati Kav. 70 Bampakerep, Ngaliyan, Semarang 50185. Email: nazalnifa@yahoo.co.id

"INDEKS PENGELOLAAN MASJID BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN TRENGGALEK JAWA TIMUR"

Jurnal Dialog Vol. 41, No.1, Juli 2018. hal: 101-110

KRITERIA PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian dengan topik masalah sosial dan keagamaan.
2. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
3. Naskah ditulis dengan kaidah tata Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baku dan benar.
4. Penulis membuat surat pernyataan bahwa naskah yang dikirim adalah asli dan memenuhi persyaratan klirens etik dan etika publikasi ilmiah (bebas dari plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi) berdasarkan Peraturan Kepala I- [Pl No. 8 Tahun 2013 dan No.5 Tahun 2014.
5. Apabila naskah ditulis dari hasil penelitian kelompok dan akan diterbitkan sendiri, diharuskan menyertakan surat pernyataan persetujuan tertulis dari anggota kelompok yang lain.
6. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4).
7. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maksimal 15 kata menggambarkan isi naskah secara keseluruhan.
8. Judul Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kapital, bold, center, sedangkan judul Bahasa Inggris ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, italic, bold dan center.
9. Nama penulis tanpa gelar akademik diletakkan di tengah (center), Nama instansi, alamat instansi, dan email penulis diletakkan dalam satu baris dan di tengah (center).
10. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwi bahasa (Inggris dan Indonesia). Abstrak ditulis dalam satu paragraph, diketik dengan 1 spasi, jenis huruf Palatino Linotype ukuran 11, jumlah kata 150-200 kata. Abstrak Bahasa Inggris diketik dengan menggunakan format italic.
11. Abstrak, berisi gambaran singkat keseluruhan naskah mengenai permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan rekomendasi kebijakan.
12. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah *Palatino Linotype* ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki.
13. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah *Arabic Transparent* atau *Traditional Arabic* ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki.
14. Penulisan kutipan (footnote) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago Contoh:

Footnote

Satu Penulis

Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Dua Penulis

John B. Christianse and Irene W. Leigh, *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices* (Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002), 45-46.

Artikel pada Jurnal

Footnote

Tom Buchanan. "Between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

Bibliografi

Satu Penulis

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane press, 1993.

Dua Penulis

Christianse, John B., and Irene W. Leigh. *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices*. Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002.

Tiga Penulis

Venolia, Jean P., Georgio Cordini, and Joseph Hitchcock. *What Makes a Literary Masterpiece*. Chicago: Hudson, 1995.

Banyak Penulis

Bailyn, Bernard, et al. *The Great Republic*. Lexington, MA: D.C. Heath, 1977.

Penulis Anonim

Beowulf: A New Prose Translation. Trans. E. Talbot Donaldson. New York: W.W. Norton, 1966.

Multi- Volume

Dorival, Bernard, *Twentieth Century Painters*. Vol 2. New York: Universe Books, 1958.

Hasil Produksi Editor

Guernsey, Otis L. , Jr., and Jeffrey Sweet, eds. *The Burns Mantle Theatre Yearbook of 1989-90*. New York: Applause, 1990.

Artikel pada Jurnal

Buchanan, Tom. "13etween Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

Artikel pada Prosiding/Conference Paper

Tidak diterbitkan

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." Paper presented at the 16th Annual Agricultural Conference, Pietersburg University, South Africa, April 8-11, 2003.

Diterbitkan dan diedit

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." *In Proceedings of the 16th Annual Agricultural Conference*, April 8-11, 2003, Pietersburg University, South Africa. Edited by Jan Van Riebeek. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004.

Diterbitkan tanpa pengeditan

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting," *In Agricultural in the North: Are We Making a Difference?* Conference Proceeding, April 8-11, 2003. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004,

Sumber Online

Website

Tice-Deering, Beverly. *English as a Second Language*. <http://www.seattlecentral.org/faculty/bticed> (accessed July, 2005). University of Chicago Dept. of Romance Languages and Literatures. Romance Languages and Literature. <http://humanities.uchicago.edu/romance> (accessed July 27, 2009).

E-Book

Thornton, Chris. *Truth from Trash: How Learning Makes Sense*. Cambridge, MA: MIT Press, 2000. <http://emedia.netlibrary.com>.

E-Journal

Warr, Mark, and Christophers G. Ellison. "Rethinking Social Reaction to Crime: Personal and Altruistic Fear in Family Households." *American Journal of Sociology* 106, no. 3 (2000): 551-78. <http://www.journals.uchicago.edu/AJS/journal/issues/v106n3/050125/050126.html>. (accessed June 28, 2003),

15. Transliterasi berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987.
16. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan, menguraikan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian literatur, menguraikan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%)
 - c. Metode penelitian, berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%)
 - d. Hasil penelitian dan pembahasan (50%)
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%)
 - f. Ucapan terima kasih
 - g. Daftar Pustaka. Jumlah sumber acuan dalam satu naskah paling sedikit 10 dan 80% di antaranya merupakan sumber acuan primer dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber acuan primer adalah sumber acuan yang langsung merujuk pada bidang ilmiah tertentu, sesuai topik penelitian dapat berupa tulisan dalam makalah ilmiah dalam jurnal internasional maupun nasional terakreditasi, hasil penelitian di dalam disertasi, tesis maupun skripsi.
17. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

